

HUBUNGAN KEPEMIMPINAN CAMAT TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR CAMAT ULEE KARENG KOTA BANDA ACEH

Bahagia^{*1}, Maghfira Faraidiany¹, Muliawati¹

¹Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Program Ilmu Politik, Univeritas Syiah Kuala
Jln. Teuku Nyak Arief, Kpelma Darussalam Kec Syiah Kuala Kota Banda Aceh

* Corresponding Author: bahagia88@usk.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 1, 2024

Revised June 5, 2024

Accepted July 5, 2024

Available online June 6, 2024

Kata Kunci:

kepemimpinan, kinerja pegawai,
camat

Keywords:

leadership, employee performance, sub-
district head

ABSTRAK

Pemerintahan Kecamatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan yang secara Administrasi mengkoordinasikan Pemerintahan Gampong dalam wilayah Kecamatan Ulee Kareng di Kota Banda Aceh. Penyelenggaraan Hubungan Kepemimpinan Camat Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Ulee Kareng Kota Banda Aceh dilakukan melalui pembinaan agar pegawai dapat menyadari dan mampu melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan secara penuh tanggungjawab sehingga dapat menjelmakan diri sebagai aparatur yang bersifat *customer orientet*. Penelitian ini adalah merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan latar belakang permasalahan adalah 1)

Bagaimana Hubungan kepemimpinan Camat terhadap kinerja pegawai pada Kantor Camat Ulee Kareng Kota Banda Aceh, 2) Faktor-faktor pendukung dan penghambat terhadap Hubungan kepemimpinan camat terhadap kinerja pegawai pada kantor camat Ulee Kareng Kota Banda Aceh, dilakukan melalui pembinaan agar pegawai dapat menyadari dan mampu melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan secara penuh tanggungjawab sehingga dapat menjelmakan diri sebagai aparatur yang bersifat *customer orientet*. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana meliputi data di kumpulkan dengan menggunakan teknik Wawancara, Observasi langsung (*Partisipasi Pasif*) dan analisa Dokumentasi maupun sumber data secara primer dan sekunder dimana adanya penyajian data dan kesimpulan yang dilakukan secara interaktif, Dengan demikian penelitian ini dilakukan berdasarkan fokus dengan hasil penelitian antara lain, kepemimpinan camat kecamatan ulee kareng sudah melakukan pembinaan kepada Pegawai dalam peningkatan kinerja, melalui pendekatan persuasif bagi pegawai, memberi arahan dan petunjuk agar mampu melaksanakan tugas-tugas administrasi dan operasional serta mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara continue dan penyajian data yang *update*. sedangkan pemilihan informan dilakukan secara sengaja (*Purposive Samplig*) Dan Berdasarkan hasil penelitian dapat di jelaskan bahwa hubungan kepemimpinan Camat Ulee Kareng Kota Banda Aceh Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Ulee Kareng Kota Banda Aceh sudah berjalan namun masih banyak hambatan dalam memberi pelayanan publik di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda.

Kata Kunci: kepemimpinan, kinerja pegawai, camat

ABSTRACT

The sub-district government is an integral part of governance administration in accordance with Government Regulation No. 19 of 2008 on Sub-Districts, which administratively coordinates the Gampong Government within the Ulee Kareng Sub-District in Banda Aceh City. The implementation

of the leadership relationship of the sub-district head towards employee performance at the Ulee Kareng Sub-District Office, Banda Aceh City, is conducted through guidance to ensure employees are aware and capable of carrying out their assigned tasks with full responsibility, thus transforming themselves into customer-oriented apparatus. This study is conducted based on the following background problems: 1) How is the leadership relationship of the sub-district head towards employee performance at the Ulee Kareng Sub-District Office, Banda Aceh City? 2) What are the supporting and inhibiting factors affecting the leadership relationship of the sub-district head towards employee performance at the Ulee Kareng Sub-District Office, Banda Aceh City? The study uses a qualitative method where data is collected using interview techniques, direct observation (Passive Participation), and documentation analysis, utilizing both primary and secondary data sources with interactive data presentation and conclusion drawing. The findings of the study indicate that the leadership of the Ulee Kareng sub-district head has been fostering employee performance improvement through a persuasive approach, providing guidance and instructions to enable employees to perform administrative and operational tasks effectively and to continuously provide updated services to the community. Informants were selected intentionally (Purposive Sampling). Based on the research results, it can be explained that the leadership relationship of the Ulee Kareng Sub-District Head, Banda Aceh City, towards employee performance at the Ulee Kareng Sub-District Office has been implemented, but there are still many obstacles in providing public services in Ulee Kareng Sub-District, Banda Aceh City.

Keywords: leadership, employee performance, sub-district head

This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by PT Metrum Karya Mandiri.



PENDAHULUAN

Dalam kehidupan kepemimpinan merupakan peran penting yang sangat menentukan, khususnya dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Marlina, 2013). Kepemimpinan juga merupakan seni atau teknik, sekaligus ilmu dalam memberikan perintah atau anjuran, serta pengertian- pengertian agar dapat dipahami oleh orang-orang, dan supaya kekuasaan untuk mengajak, mempengaruhi, menggerakkan dan berjalan dengan baik dan supaya melakukan demi pencapaian tujuan pemimpin harus ada dalam suatu kelompok atau organisasi, dengan demikian keberadaan pemimpin bisa dapat dikenal oleh anggota atau pun masyarakat yang luas dalam kepemimpinannya nanti.

Seorang pemimpin dituntut untuk selalu ikut serta dalam aktifitas-aktifitas kelompoknya. Hal ini terbukti dalam sistem nilai budaya masyarakat bahwa resiko apapun yang terjadi bukan halangan bagi pemimpin untuk melaksanakan tugasnya dengan kata lain tidak ada alasan bagi pemimpin untuk tidak ikut kegiatan dalam kelompoknya (Sineke et al., 2017). Masalah kepemimpinan sudah ada sejak zaman dahulu namun pengertian tentang kepemimpinan ternyata masih terbatas, hal ini dapat terjadi karena masih banyak teori mengenai kepemimpinan yang dianggap secara berlainan, sering dikatakan bahwa masalah kepemimpinan merupakan hal yang lambat dibahas.

Sikap dan perilaku pemimpin dalam praktek kepemimpinannya dilandasi oleh komunikasi dan merupakan dasar penghormatan kepada rakyat atau masyarakat, yang dimaksudnya adalah orang tua dihormati, yang sama besar disegani dan yang kecil disayangi, tujuannya bagi seorang pemimpin harus menghormati orang yang lebih tua dari padanya, yang lebih tua diajak untuk berunding dan yang muda usianya di bimbing dan dituntun.

Munculnya kepemimpinan adalah merupakan proses dinamis yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Seseorang menjelma menjadi pemimpin atas bermacam-macam alasan. Syarat-syarat untuk memimpin di bagi dalam dua bagian yakni syarat pokok dan syarat pendukung. Syarat pokok menggambarkan faktor dominan yang mempengaruhi terpilihnya seseorang menjadi pemimpin syarat ini meliputi prestasi dan pengalaman kerja, sekaligus ketersediaan mengorbankan harta benda, keturunan dan aktifitas dalam masyarakat. Syarat pelengkap termasuk sikap kepribadian, pelopor jujur dan berpendidikan.

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah (Akhyar et al., 2023). Implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan tersebut terhadap kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah berubah statusnya menjadi perangkat daerah, kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pemerintahan, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat kewenangan dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota.

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur oleh Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat memiliki kewenangan dalam hal urusan pelayanan masyarakat selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Pemimpin dapat mempengaruhi moral, kepuasan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi (Plangiten, 2018). Kemampuan dan ketrampilan kepemimpinan dalam pengarahan adalah faktor penting efektivitas suatu organisasi. Bila organisasi dapat mengidentifikasi kualitas-kualitas yang berhubungan dengan kepemimpinan, kemampuan untuk menyeleksi pemimpin-

pemimpin yang efektif akan meningkat. Dan bila organisasi dapat mengidentifikasi perilaku dan teknik-teknik kepemimpinan efektif organisasi, berbagai perilaku dan teknik tersebut akan dapat dipelajari.

Pemimpin di setiap organisasi kerja memerlukan dan mengharapkan sejumlah pegawai yang cakap dan terampil dibidang pekerjaannya, sebagai orang yang membantunya melaksanakan tugas-tugas yang menjadi beban kerja unit masing-masing. Dalam arti seorang pemimpin menginginkan sejumlah pegawai yang efektif dalam melakukan pekerjaannya. Suatu organisasi pada dasarnya adalah suatu bentuk kerja sama antar dua orang atau lebih. Baik yang disebut organisasi ataupun kelompok, tujuannya adalah untuk mencapai sesuatu. Jika sesuatu yang ingin dicapai itu betul-betul dapat diraih, maka tujuannya efektif. Efektivitas adalah ukuran sejauh mana tujuan dapat dicapai. Efektivitas adalah suatu kontinum yang merentang dari efektif, kurang efektif, sedang-sedang, sangat kurang, sampai tidak efektif.

Efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas organisasi dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya (Hasan et al., 2022). Bila dilihat dari aspek segi keberhasilan pencapaian tujuan, maka efektivitas adalah memfokuskan pada tingkat pencapaian terhadap tujuan organisasi. Selanjutnya ditinjau dari aspek ketepatan waktu, maka efektivitas adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang telah dialokasikan untuk melakukan berbagai kegiatan.

Salah satu fungsi pemerintah yang utama adalah menyelenggarakan pelayanan umum sebagai wujud dari tugas umum pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Bahagia, 2023). Birokrasi merupakan instrumen pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang efisien, efektif, berkeadilan, transparan dan akuntabel (Rifky, 2021). Hal ini berarti bahwa untuk mampu melaksanakan fungsi pemerintah dengan baik maka organisasi birokrasi harus profesional, tanggap, aspiratif terhadap berbagai tuntutan masyarakat yang dilayani. Seiring dengan hal tersebut pembinaan aparatur negara dilakukan secara terus menerus, agar dapat menjadi alat yang efisien dan efektif, bersih dan berwibawa, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas umum pemerintah maupun untuk menggerakkan pembangunan secara lancar dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian terhadap masyarakat.

Pemerintahan Kecamatan adalah suatu instansi pemerintahan yang memberi pelayanan kepada masyarakat di wilayah Administrasi Kecamatan Ulee Kareng yang dimana perangkat pemerintahan wilayah Kecamatan yang menyelenggarakan

pelaksanaan tugas pemerintahan umum di wilayah Kecamatan dari beberapa desa. Sebagaimana pelayanan merupakan tugas utama aparatur negara sebagai abdi negara dan masyarakat, tugas ini telah jelas di gariskan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat, pelayanan di Kecamatan merupakan barisan terdepan dalam melaksanakan tugas pemerintahan selain kepala desa, pembangunan dan kemasyarakatan yang dibantu oleh pemerintahan desa atau Gampong. Oleh karena itu, pentingnya tugas, fungsi, dan wewenang kecamatan untuk pembangunan daerah adalah yang paling dekat dengan masyarakat tersebut (Akhyar et al., 2020).

Untuk mencapai efektivitas kerja yang diinginkan, Camat Ulee Kareng harus menjalankan peran dan tugasnya dengan cara memotivasi para pegawainya dan juga selalu berkomunikasi, agar para pegawainya menyadari bahwa mereka memang dibutuhkan dan tidak ada pembedaan sehingga mereka mengerjakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya demi kemajuan bersama. Camat juga dibutuhkan untuk mengontrol kegiatan para pegawai apakah berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau tidak. Camat dan pegawai harus saling bekerja sama dalam mencapai tujuan tersebut. Masing-masing harus menyadari tugas dan tanggung jawabnya.

Sorotan tajam tentang kinerja birokrasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik menjadi wacana yang aktual dalam studi administrasi negara akhir-akhir ini. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan dan pada sisi lain munculnya konsep privatisasi, swastanisasi, kontak kerja yang pada intinya ingin meminimalkan campur tangan pemerintah yang terlalu besar dalam pelayanan publik. Kinerja birokrasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik lebih rendah ketimbang yang dilakukan oleh pihak swasta atau kelembagaan masyarakat lainnya. Penilaian kinerja birokrat pemerintah selama ini cenderung didasarkan pada faktor-faktor input seperti jumlah pegawai, anggaran, peraturan perundangan dan termasuk pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan dan bukan pada faktor-faktor output atau outcomes-nya, misalnya tingkat efisiensi biaya, kualitas layanan, jangkauan dan manfaat pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu dalam praktek penyelenggaraan pelayanan publik masih terdapat berbagai masalah antara lain perbedaan antara kinerja yang diharapkan (*intended performance*) dengan praktek sehari-hari (*actual performance*), perbedaan antara tuntutan kebutuhan masyarakat dengan kemampuan pelayanan aparatur pemerintah, perbedaan antara keterbatasan sumber daya anggaran pemerintah dengan kebocoran pada tingkat pelaksanaannya. Sementara itu peran aparatur negara (birokrasi) sejak beberapa dekade yang lalu lebih diisarkan sebagai penyandang dua peran yaitu sebagai Abdi Negara dan

sebagai Abdi masyarakat dan peran sebagai abdi negara menjadi sangat dominan ketimbang peran sebagai abdi masyarakat.

Menurut Thoha (2007: 37) "Siklus pelayanan lebih berakses ke kekuasaan birokrasi ketimbang melayani masyarakat. Akibatnya aparaturnya cenderung melayani dirinya sendiri dan meminta layanan dari masyarakat". Berkaitan dengan hal ini bahwa tugas aparaturnya sebagai pelayan harus lebih diutamakan terutama yang berkaitan dengan mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan masyarakat, mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan publik dan memberikan kepuasan publik.

Kepemimpinan (*leadership*) dapat dikatakan sebagai cara dari seorang pemimpin (*leader*) dalam mengarahkan, mendorong dan mengatur seluruh unsur-unsur di dalam kelompok atau organisasinya untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang diinginkan sehingga menghasilkan kinerja pegawai yang maksimal. Dengan meningkatnya kinerja pegawai berarti tercapainya hasil kerja seseorang atau pegawai dalam mewujudkan tujuan organisasi. Kepemimpinan yang ada di Kantor Camat Ulee Kareng Kota Banda Aceh dipimpin oleh seorang Camat yang membawahi beberapa orang pegawai membutuhkan kepemimpinan yang baik sehingga Kantor Camat Ulee Kareng Kota Banda Aceh dapat menciptakan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Salah satu permasalahan yang terjadi di Kantor Camat Ulee Kareng Kota Banda Aceh yang juga merupakan permasalahan hampir di semua lembaga atau instansi pemerintahan adalah munculnya keluhan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan kepada masyarakat yang tidak maksimal seperti yang dikemukakan oleh Menteri Perindustrian "kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih memprihatinkan, masih buruknya kinerja PNS diketahui dari masih tingginya persentase keterlambatan masuk kerja dan pelaksanaan tugas yang tidak sesuai standar".

Pemerintahan Kecamatan Ulee Kareng, yang berkerja untuk masyarakat sudah seharusnya memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Untuk mendapatkan pelayanan tersebut, pegawai kantor kecamatan Ulee Kareng harus efektif dalam menjalankan pekerjaannya. Akan tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan, sering ditemukan pegawai yang tidak berkerja efektif sebagaimana mestinya, dimana para pegawai sering datang terlambat masuk kerja dari jam kerja yang telah ditentukan, bahkan meninggalkan kantor sebelum jam kerja berakhir. Fasilitas-fasilitas pendukung bagi para pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya juga masih belum memadai, sehingga terkadang mereka memberikan pelayanan yang kurang memuaskan terhadap masyarakat. Oleh karena itu disini dituntut kepemimpinan seorang camat dalam mengelola

para bawahannya agar lebih efektif dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya demi terciptanya aparatur pemerintahan yang baik. Untuk mencapai kinerja yang baik, Camat dan pegawai harus saling bekerjasama dimana mereka haruslah menyadari tugas dan tanggung jawabnya masing-masing demi kemajuan bersama (Hasan, 2023). Hal ini mendorong penulis untuk mengkaji dan meneliti masalah Kepemimpinan Camat yang dikaitkan dengan kinerja pegawai. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kepemimpinan Camat Terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Camat Ulee Kareng Kota Banda Aceh**

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan Pendekatan penelitian kualitatif karena memiliki keunggulan dalam proses penelitiannya, yaitu bersifat holistik (menyeluruh) dan dinamis, adanya hubungan timbal balik (interaksi) antara peneliti dengan yang diteliti serta *transferability* (tidak bersifat general) di mana dalam penelitian kualitatif tidak melakukan generalisasi, tetapi lebih menekankan pada tingkat makna. Sehingga dapat memudahkan pembaca dari hasil penelitian ini memahami apa yang menjadi masalah (Sugiyono, 2012)

Metodologi kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis, pendekatan kualitatif yang menggunakan data lisan suatu bahasa memerlukan informan (Bungin, 2007). Oleh karena itu, dalam penelitian ini jumlah informan tidak ditentukan jumlahnya. Dengan kata lain, jumlah informannya ditentukan sesuai dengan keperluan penelitian

Fokus penelitian ini adalah kepemimpinan camat dalam peningkatan kinerja pegawai di kantor Camat Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Yang dimaksud dengan kepemimpinan camat dalam penelitian ini adalah cara atau kemampuan camat untuk peningkatan kinerja pegawai di kantor Camat Ulee Kareng untuk mengikutinya dan bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama, dapat di nilai melalui:

1. *Integration*, yaitu tindakan-tindakan yang mengarah pada peningkatan koordinasi.
2. *Communication*, yaitu tindakan-tindakan yang mengarah pada meningkatnya saling pengertian dan penyebaran informasi.
3. *Product emphasis*, yaitu tindakan-tindakan yang berorientasi pada volume pekerjaan yang dilakukan.
4. *Organization*, yaitu tindakan-tindakan yang mengarah pada perbedaan dan penyesuaian dari padatugas-tugas.

5. *Evaluation*, yaitu tindakan-tindakan yang berkenaan dengan pendistribusian ganjaran-ganjaran atau hukuman-hukuman.

6. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Penelitian Faktor pendukung

Penelitian ini dilakukan di kantor Camat Ulee Kareng Kota Banda Aceh, yang beralamat di jalan Prof. Hasyimi Desa Pango Deah Kecamatan Ulee Kareng Provinsi Aceh. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan pada umumnya instansi pemerintah saat ini kurang memberikan pelayanan yang baik terhadap kebutuhan masyarakat serta belum dapat mencapai tujuan dari fungsi pemerintahan. Para pegawai pemerintah kurang optimal dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai apa yang menyebabkan tugas-tugas dan fungsi para pegawai tersebut tidak dapat dijalankan secara optimal dan konsisten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan bersama tujuh orang narasumber, diketahui bahwa kurikulum merdeka ini mulai diterapkan di sekolah sejak tahun 2022. Akan tetapi, guru dan sekolah menghadapi sejumlah tantangan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara menyeluruh khususnya dalam bidang Bahasa Inggris.

1. Sejarah Singkat Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh

Dengan terjadinya perubahan dan perkembangan wilayah di Indonesia era reformasi maka berdasarkan Peraturan Daerah atau Qanun Daerah Kota Banda Aceh nomor 8 tahun 2000 tentang Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kota Banda Aceh di pemerintahan Aceh yang sudah mengalami pemekaran wilayah yang semula hanya memiliki kecamatan sebanyak 5 (lima) kecamatan yang terdiri dari:

1. Kecamatan Kuta Alam;
2. Kecamatan Baiturrahman;
3. Kecamatan Syiah Kuala;
4. Kecamatan Meuraxa;
5. Kecamatan Jaya Baru.

Berikut terjadi pemekaran Kota Banda Aceh bertambah kecamatan menjadi 9 (Sembilan) dengan menambah 4 (empat) Kecamatan lagi yaitu:

1. Kecamatan Kuta Raja;
2. Kecamatan Banda Raya;
3. Kecamatan Ulee Kareng; dan

4. Kecamatan Lueng Bata;

Dengan demikian maka perkembangan Kota Banda Aceh yang berada dalam daerah Provinsi Aceh sebagai pusat perkotaan, kota perdagangan dimana terjadinya transaksi jual beli dan perputaran mata uang masyarakat sebagai pertumbuhan ekonomi kota. Dari jumlah 9 (Sembilan) kecamatan ini maka wilayah kecamatan Ulee Kareng sebagai salah satu Kecamatan di Kota Banda Aceh yang posisinya sangat strategis sebagai pusat ekonomi masyarakat dan kota dagang dimana sebagai kecamatan pembatas dengan kota Aceh Besar, sehingga harus mampu bersaing dan bersanding sebagai pusat kecamatan yang sedang mekar dan menata diri sebagai ibukota yan apik.

Selain itu kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh memiliki misi dan misi yang bagus dalam menjalankan roda Pemerintahan di kecamatan, adapun misi dan misi yang peneliti temukan di kantor camat Ulee Kareng adalah sebagai berikut:

Visi dan misi

1. Visi, Terselenggaranya manajemen pemerintahan kecamatan secara efektif dan Evisien untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance)
2. Misi, adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mendate yang di berikan, adapun misi pemerintahan Ulee Kareng Kota Banda Aceh sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelenggaran Administrasi umum;
2. Meningkatkan kualitas pemerintahan umum dan desa atau gampong;
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui optimalisasi pemberdayaan masyarakat;
4. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pelayanan umum di bidang kesejahteraan sosial
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat.
6. Memberikan pelayanan yang berkualitas dan bermutu.

Disamping itu kecamatan Ulee Kareng sebagai penghujung Kota Banda Aceh yang mengepalai beberapa wilayah Gampong yang bersifat adminitratif dalam pengertian bahwa pembinaan dilakukan ditingkat kecamatan dari semua sektor kehidupan baik bersifat pemerintahan, pembangunan maupun sosial kemasyarakatan, sehingga secara hirarkhis (jenjang atau tingkatan) pemerintahan yang membawahi Gampong-gampong di

terus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah disesuaikan dengan pemerintahan kecamatan yang berada di seluruh Republik Indonesia .

Dalam perkembangan wilayah dengan wawasan pengetahuan sebagai ilustrasi awal menunjukkan bahwa Kecamatan Ulee Kareng sendiri sebagai kecamatan pemekaran yang terlahir dari kecamatan syiah Kuala dengan kekuasaan wilayah atas 2 (dua) mukim 9 (sembilan) gampong dan 31 (tiga puluh) dusun, namun wilayah Administrasi yang dikuasai kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh meliputi gampong-gampong sebagai berikut:

1. Gampong Lambhuk;
2. Gampong Doy;
3. Gampong Ie Masen Ulee Kareng;
4. Gampong Ilie;
5. Gampong Lamteh;
6. Gampong Pango Raya;
7. Gampong Pango Deah;
8. Gampong Ceurih;
9. Gampong Lam Glumpang.

Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh saat ini sebagai salah satu kecamatan yang berada di salah satu kota di provinsi Aceh tempatnya Kota Banda yang di pimpin oleh seorang walikota dan wakil walikota yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan dan sedang memekarkan diri seiring dengan berkembang di wilayah Kota Banda Aceh dalam membangun. Hal ini terlihat didasarkan pada kepemimpinan Camat Ulee Kareng Kota Banda Aceh yang mampu menggerakkan masyarakat pemukiman untuk sadar membangun. Secara geografis Kota Banda Aceh dapat digambarkan jumlah kecamatan sebanyak 9 (Sembilan) kecamatan yang diklasifikasi jumlah 90 (Sembilan puluh) gampong, Pengkategorian dari 9 kecamatan di Kota Banda Aceh dimaksud maka Sekretariat Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh sendiri sebagai salah satu kecamatan, dari sejumlah kecamatan binaan Kota Banda Aceh yang terus dilakukan perbaikan baik dari pelayanan dan prasarana yang di butuhkan oleh masyarakat. Selaku Kecamatan yang berada dalam kota sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan maka Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota yang langsung tunduk dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah (Walikota) melalui Sekretaris Daerah. Dalam kaitan ini banyak masyarakat membutuhkan pelayanan secara administrasi maupun secara operasional sehingga dapat mengelola

daerah pegunungan yang berada dibawahnya dapat terlaksana program kegiatan sebagaimana yang direncanakan, sesuai dengan berbagai kebutuhan masyarakat secara individual maupun kelompok masyarakat secara umum dengan berbagai ragam wacana untuk mengikuti perkembangan yang dinamis dalam pemerintahan dalam pelayanan umum di semua sektor kecamatan khususnya kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh sebagai geografi peta kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh di bawah ini.



Sumber : Sekretariat Kecamatan Ulee Kareng tahun 2016

Gambar 1 : Peta lokasi Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

Dalam pemekaran wilayah kecamatan maka Kota Banda Aceh saat ini berbatas dengan:

Sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Aceh Besar

Sebelah Timur berbatas dengan Kota Alam

Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Lueng Bata

Sebelah Utara berbatas dengan Syiah Kuala

Adapun profil kecamatan ulee kareng adalah sebagai berikut:

- | | | |
|----------------------|---|--------------------------------|
| ➤ Nama kecamatan | = | Ulee Kareng |
| ➤ Ibu kota kecamatan | = | Ulee Kareng |
| ➤ Kota | = | Banda Aceh |
| ➤ Provinsi/negara | = | Aceh/Indonesia |
| ➤ Luas kecamatan | = | 6,15 Km ² (615,0 H) |
| ➤ Mukim | = | 2(dua) |
| ➤ Jumlah gampong | = | 9(Sembilan) |
| ➤ Jumlah Dusun | = | 30(tiga puluh) |
| ➤ Tinggi Rata-Rata | = | 3,8 m di atas permukaan laut |

Dalam perkembangan berikutnya Kecamatan Ulee Kareng banyak membenah diri dalam kinerja admintrasi pemerintahan dan pembangunan sarana dan prasarana dalam

kondisi baik pada masa sebelum musibah tsunami maupun pasca bencana tsunami minggu tanggal 26 Desember 2004 dan kecamatan ini termasuk salah satu kecamatan yang tidak terjamah dampak tsunami secara langsung, namun secara geografis kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh berada jauh dari garis pantai sampai radius 20 kilometer dan salah satu kecamatan yang tidak terjadi Tsunami pada minggu 26 desember 2004 yang lalu. Adapun dalam masa rekonstruksi pasca bencana gempa dan tsunami merupakan babak baru bagi kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh dimana perkembangan pembangunan, ekonomi dan peningkatan mobilitas penduduk secara langsung menjadi sentral ekonomi baru di Kota Banda Aceh, demikian pula orientasi kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh maupun Provinsi ikut berpartisipasi mendorong kemajuan kecamatan Ulee Kareng melalui kebijakan pemerintah dalam pembangunan terutama yang bersifat sarana berupa jalan seperti zona jalan Panglima Nyak makam-Lambhuk jembatan dan prasarana berupa perkantoran yang permanen sehingga membuat pertumbuhan zona baru sangat berdampak pada denyut perkembangan kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Bila dicermati lebih jauh lagi kita akan menemui Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh itu sendiri di pimpin seorang Camat sebagai alumnus IPDN tahun 1988 atas nama Aulia R Dahlan S sos, yang memimpin Kecamatan dengan berbagai liku liku, dan rintangan namun dengan segala daya untuk memajukan Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kinerja pegawai dengan membina kelayakan Aparatur Negara sebagai abdi Negara, abdi pemerintah dan abdi masyarakat yang mengacu pada undang undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Disisi lain Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh yang giat-giatnya membangun juga telah memiliki gedung sendiri dalam upaya Memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat desa dengan berbagai keperluan penyelenggaraan administrasi maupun kebutuhan masyarakat lainnya dengan mengutamakan sistematika hirarkhis berdasarkan *job discreption*..Keadaan demografi pada dasarnya sangat mempengaruhi keberadaan kinerja pemerintahan kecamatan karena banyaknya itensitas pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu yang relative singkat sehingga dapat Memberikan pemetaan terhadap keberadaan jumlah penduduk, kondisi laki-laki dan perempuan termasuk persentase perkembangan jumlah penduduk, adapun jumlah penduduk berdasarkan hasil proyeksi tahun 2016 sesuai data statistik sejumlah 26.636 jiwa yang terdiri atas 13.590 jiwa laki-laki atau (50,15%) dan 13.048 jiwa perempuan atau (49,85%). Dengan demikian dari jumlah 26.636 jiwa, penduduk kecamatan ulee kareng yang mendominasi terdapat di “Desa Lambhuk” akan tetapi secara mayoritas dari keseluruhan penduduk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh

beragama islam sebanyak 99%, sedangkan usaha-kegiatan yang mendominasi kepala keluarga dari sektor wiraswasta, pegawaidan swastanisasi. Perkembangan demografi sejak tsunami Aceh terjadinya perpindahan penduduk yang tinggi ke kecamatan ulee kareng dengan urban yang tinggi dari kota ke kota maka secara otomatis terjadinya populasi penduduk di kecamatan, kecamatan sebagaimana di amanatkan dalam undang-undang maka ibukota harus memperhatikan aspek tata ruang ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan kependudukan sosial ekonomi, sosial politik dan sosial budaya itu sendiri. Selain itu pemerintahan camat juga sebagaimana di maksud ayat (1) "Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagaimana urusan otonomi daerah", meliputi aspek;

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. pegawaisan;
- f. Fasilitas;
- g. Penetapan;
- h. Penyenggaraan;
- i. Kewenangan lain dan di limpahkan.

2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

Struktur organisasi secara umum disebut juga sebagai Bagan dan Susunan Organisasi sebagai tatanan suatu organisasi dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan pada seseorang sebagai tanggungjawab secara konsisten dan konsekwen sesuai jenjang tugas. Adapun susunan organisasi Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh terdiri atas:

Adapun Struktur organisasi dan Tata Kerja (SOTK) kecamatan, terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi tata pemerintahan;
- d. Seksi pemberdayaan masyarakat dan gampong;
- e. Seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Seksi kesejahteraan social dan pelayanan umum;
- g. Seksi pelaksanaan keistimewaan aceh; dan

h. Kelompok jabatan fungsional;

Sekretariat terdiri dari:

- a. Subbagian umum
- b. Subbagian keuangan; dan
- c. Subbagian kepegawaian.

Berdasarkan peraturan pemerintahan Camat merupakan perangkat daerah yang berada di daerah kota Banda Aceh atau kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan di pimpin oleh seorang camat adapun camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekda, sedangkan sekretariat sebagaimana di maksud dalam pasal 149 ayat (1) huruf b di pimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada camat, sedangkan seksi sebagaimana di maksud dalam pasal 149 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g di pimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat melalui sekretaris sedangkan subbagian sebagaimana di maksud dalam pasal 149 ayat (2) di pimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Dalam tugas pokok, fungsi dan kewenangan camat adalah sebagaimana dimaksud adalah pasal 152 Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan sebagaimana tata kerja kecamatan pada umumnya yang meliputi sebagai berikut.

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - a. Mengkoordinasikan upaya penyenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan perundang-undangan;
 - c. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - d. Mengkoordinasikan penyenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - e. Membina penyenggaraan mukim dan pemerintahan gampong; dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan gampong.

Sedangkan pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana di maksud apa ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perungan-undangan selain itu pelimpahan sebagian wewenang walikota kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria

eksternalitas dan efefisiensi dan ketentuan lebih lanjut dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Camat sebagaimana di maksud pada ayat (1) ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) di atur degan peraturan walikota berpedomanan pada qanun ini.

Dalam pelaksanaan memyenggarakan tugas sebagaimana di maksud dalam pasal 152 Camat menyelenggarakan fungsi;

- a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari pemerintahan kota;
- b. Pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- c. Pembinaan penyenggaraan pemerintahan mukim, kelurahan dan gampong;
- d. Pelaksnaan tugas lain yang di berikan oleh walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.camar

Adapun demikian dalam pemekaran Kecamatan dalam Kota Banda Aceh dilakukan pemerintah atas permintaan masyarakat desa bersangkutan, baik dikarenakan luasnya desa dan jauhnya pelayanan publik dan dalam berbagai Administrasi penduduk seperti surat-menyurat, jumlah penduduk maupun jarak tempuh ke pusat kecamatan serta mencukupi keberadaan desa yang diperlukan dalam sebuah kota. Dalam kaitan ini kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh saat ini sebagai pusat perdagangan dan sebagai peralihan masyarakat yang bersifat hitoregen sehingga alternative utama yang ditempuh dengan melakukan pemekaran kota, gampong maupun lorong lorong dalam tiap pemukiman masyarakat untuk memudahkan dalam pelayanan Adminitarasi itu sendiri,dalam satu segi dengan adanya peraturan pemerintahan tetap tanggung jawab kecamatan dalam Memberi tugas dan fungsinya dalam pemerintahan kecamatan untu masyarakat dalam segala hal yang berhubungan dengan Administrasi dan lain sebagainya yang menjadi wewenang kecamatan dalam melakukan fungsi untuk masyarakat yang berada di wilayah kerjanya kecamatan yang bersangkutan dalam hal ini wewenang sebagaimana amanat undang-undang dalam pelayanan kecamatan kepada masyarakat umum dalam berbagai Aminitrasi umun yang harus di berikan dengan baik dan berkualitas sesuai dengan fungsi dan tugas kecamatan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil peneltian tentang need analysis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa semenjak tahun 2022 kebijakan kurikulum Merdeka seudah diterapkan di sekolah kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. Pembelajaran Bahasa Inggris

yang terus diinovasikan dari berbagai sudut, nyatanya juga mendapatkan sentuhan implementasi kurikulum Merdeka. Penerapan kurikulum Merdeka dalam pembelajaran Bahasa Inggris disambut sangat antusias oleh berbagai pihak di jenjang SMA dikarenakan pada fase ini, siswa SMA berada di fase jenuh, penuh adaptasi dengan materi materi baru yang lebih rumit, banyaknya tugas yang harus dikerjakan dan butuh adanya inovasi dalam pembelajaran Bahasa Inggris. Kurikulum Merdeka hadir sebagai salah satu Solusi terbaik yang dapat mengembangkan kreativitas siswa secara real context. Siswa merasa diperhatikan untuk mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan proficiency nya masing-masing.

Kepemimpinan Camat terhadap kinerja pegawai Kantor Camat Ulee Kareng kota Banda Aceh secara analisis kecamatan Ulee Kareng kota Banda Aceh adalah salah satu perangkat kecamatan yang berada di kota Banda Aceh dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai ujung tombak dalam pelayanan kepada masyarakat, senantiasa berusaha untuk meningkatkan pegawai oleh pimpinan Camat, namun dalam pelaksanaan tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dapat mempengaruhi kinerja itu sendiri di kecamatan yang membawahi 9 gampong melalui pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

Kecamatan Ulee Kareng adalah salah satu kecamatan yang berbatasan langsung dengan kabupaten Aceh Besar, dan merupakan salah satu kecamatan yang mengalami peningkatan penduduk sejak tsunami terjadi di Aceh, pada minggu 26 Desember 2004, oleh sebab itu sudah sepenuhnya kinerja di kecamatan Ulee Kareng di tingkatkan untuk melayani masyarakat, tentu peran pemimpin dan pengaruh kepemimpinan kecamatan sangat berpengaruh dalam hal memberi pelayanan bagi seluruh gampong yang berada di bawah kecamatan Ulee Kareng apapun kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh gampong sebagai berikut:

1. Gampong Pango Raya;
2. Gampong Ilie;
3. Gampong Lambhuk;
4. Gampong Doy;
5. Gampong Ie Masen Ulee Kareng;
6. Gampong Lamteh;
7. Gampong Ceurih;
8. Gampong Pango Deah;
9. Gampong Lam Glumpang;

Dalam membangun kinerja bawahan kepemimpinan Camat Ulee Kareng Kota Banda Aceh dapat di simpulkan dimana kepemimpinan Beliau dalam berkerja melakukan pendekatan tipe kepemimpinan yang demoratis,hal ini peneliti dapat dapatkan dari hasil penelitian. Hal ini berarti bahwa kepemimpinan camat ulee kareng kota banda aceh cenderung mengadopsi kepemimpinan yang demoratis,dimana kepemimpinan mendorong pegawai untuk member kinerja yang baik dan berkualitas dan juga melakukan pendekatan dengan bawahan dengan melibatkan keahlian bawahan sehingga adanya interaksi dalam memfasilitasi bawahan dalam berkenerja yang baik.

Kpemimpinan Camat Ulee Kareng Kota Banda aceh untuk meningkatkan kinerja pegawai kepada masyarakat gampong menyadari bahwa ia tidak dapat bekerja sendiri dalam menjalankan organisasi dalam Adminitrasi kependudukan di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, A., Usman, U., Saifuddin, S., Sadhana, K., & Musriandi, R. (2023). Freies Ermessen in the Delegation of Authority from District Government to Village Government. *Jurnal Ilmiah Peuradeun; Vol 11 No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Peuradeun*. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.851>
- Akhyar, Sholahuddin, A., Hariyanto, T., & Mursyidin. (2020). A study of implementation of village government competences in Aceh Province, Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12(9), 194–205.
- Bahagia. (2023). Implementasi Kesiapan Pemerintah Dalam Menghadapi Pemilu Serentak Di Provinsi Aceh (Studi Kasus Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Jurnal Metrum*, 1(1), 143–155. <http://jurnal.mkmandiri.com/index.php/JMKM/article/view/15%0Ahttp://jurnal.mkmandiri.com/index.php/JMKM/article/download/15/14>
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana Prenada Media Group.
- Hasan, R. (2023). Efektivitas Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan di Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat. *Jurnal Metrum*, 1(1), 157–176.
- Hasan, R., Nuthihar, R., & Hanif, H. (2022). Manajemen Kemitraan Perguruan Tinggi Vokasi Dalam Meningkatkan Kompetensi Lulusan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(4), 376. <https://doi.org/10.31258/jkp.v13i4.8145>
- Marlina, L. (2013). Tipe-Tipe Kepemimpinan Dalam Manajemen Pendidikan. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 18(02 SE-Article), 215–227. <https://doi.org/10.19109/td.v18i02.47>
- Plangiten, P. (2018). Gaya Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada PT Pos Indonesia (Persero) Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4), 2155–2166.

- Rifky, I. P. (2021). Legitimasi Pelayanan Publik Perangkat Kelurahan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009. *Jurnal Esensi Hukum*, 3(2 SE-Articles). <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.84>
- Sineke, A., Gosal, R., & Lopian, M. (2017). Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Desa Atoga Timur Kecamatan Motongkad. *Jurnal Eksekutif*, 1(1 SE-Articles). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/16312>
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Thoha, Miftah. (2007). *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Edisi 12. Jakarta: PT. Grafindo persada.
- Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang *Pemerintah Camat*.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang *Struktur Organisasi dan tata kerja kecamatan*.